

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mobilisasi politik pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh elit politik nasional saja tetapi juga sering terjadi pada elit lokal yang berada di dalam suatu daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat pemilihan kepala desa. Politik elektoral<sup>1</sup> yang terlihat melalui cara yang dilakukan pada pemilihan umum di Indonesia pada hakikatnya tidak harus selalu partai politik sebagai alatnya, tetapi hal tersebut juga dapat dilakukan melalui mobilisasi alat non politik seperti aktor ketokohan dan pada sebuah lingkaran jaringan sosial. Pada era tahun 1950-an, misalnya, dinamika politik yang terjadi di negara Indonesia misalnya sangatlah dipengaruhi oleh aktor-aktor politik sehingga mampu memobilisasi para kyai dan ulama melalui partai-partai Islam pada kala itu (Nugroho 2011).

Mobilisasi politik dapat ditelusuri dari gagasan Huntington mengenai institusionalisasi politik atau pelembagaan politik. Mobilisasi politik sudah sering terjadi di negara Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemilu yang dilaksanakan saat itu tidak berjalan dengan baik dan demokratis.<sup>2</sup> Campur tangan aktor-aktor politik

---

<sup>1</sup> Mobilisasi politik elektoral dapat berjalan tanpa harus dikaitkan dengan fenomena pelembagaan politik kepartaian. Partai politik dengan derajat pelembagaan politik yang tidak terlalu kuat atau yang dikelola melalui kepemimpinan personal, tetap punya peluang untuk melakukan aktivitas mobilisasi politik melebihi partai politik yang memiliki tingkat pelembagaan yang kuat.

<sup>2</sup> Manifestasi lain dari politik mobilisasi adalah orientasi partai-partai politik yang lebih terfokus pada pemilihan pejabat-pejabat dan perebutan kekuasaan atas jabatan-jabatan tertentu daripada memperkuat basis ideologi anggota partai politik. Akibatnya, koalisi-koalisi antar partai dilakukan bukan karena partai-partai yang berkoalisi memiliki kesamaan ideologi untuk membangun negara tetapi lebih kepada peningkatan jumlah anggota partai untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena itu jargon seperti “dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri” menjadi dogma yang diyakini dan memang terjadi. Koalisi-koalisi tersebut sangat semu dan dangkal yang dengan mudah berubah sesuai dengan “lowongan” jabatan yang ada. Politikus-politikus yang terlibat juga semakin profesional dan berubah seolah-olah menjadi politikus adalah jabatan karier dan mata pencaharian, dan bukan merupakan pejuang-pejuang prinsip atau ideologi tertentu. Akibatnya, politikus bisa dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain, meski

dari pemerintah mampu menempatkan partai tertentu sebagai pemenang dalam setiap pemilu (Mertha: 2004). Penjaringan mobilisasi politik nyatanya dilakukan secara pendekatan kultural melalui etnik/ras, agama, gender, budaya, jaringan kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan dan lain sebagainya (Nugroho :2011). Munculnya berbagai bentuk organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, komunitas dan lain sebagainya menandakan sedang berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. Menjalankan perannya sebagai kontrol atas pemerintah dan menimbulkan suatu dinamika baru pada tatanan sosial politik. Basis massa yang jelas cenderung mudah diarahkan karena mempunyai struktur yang jelas yang merupakan sumber kekuatan organisasi kemasyarakatan hal ini menjadikan komoditi baru di dalam dunia politik dan tidak lepas dari momen pemilihan umum.

Mobilisasi sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua actor, individu dan Partai. Konsep aktivitas Mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan ( dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrumen ( dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel directional diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara Partai dan Individu. Ada dua model dalam mobilisasi. Pertama, mobilitas vertikal yaitu perpindahan individu atau objek objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat,

---

sebenarnya kedua partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda atau bahkan berseberangan. Terkait dengan hal ini, kemampuan pengorganisasian partai menjadi salah satu aspek yang penting dalam perilaku Partai ( Huntington 1977: 201).

artinya bahwa seseorang yang naik jabatan dari yang terendah ke yang tertinggi. Kedua, mobilitas horizontal, yaitu peralihan individu atau objek objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Model-model ini dapat membantu kita dalam menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana keadaan politik pada saat ini saat ini sebagaimana ditandai dengan adanya proses mobilisasi horizontal dan vertikal. Hal ini menyisakan sebuah tugas riset mobilisasi untuk menyelidiki pernyataan yang dibuat di sini bahwa hubungan hirarkis yang dilembagakan antara Partai dan individu sedang melemah sebagai sebuah hasil dari terus meningkatnya orientasi aktor ke dalam diri mereka ketika sadar akan artikulasi kepentingan, pengembangan loyalitas, dan pemanfaatan instrument-instrumen mobilisasi (Birgitta Nedelman, 1987: 181-202).

Mobilisasi Politik tidak hanya sekedar proses bagaimana setiap warga digiring dalam upaya untuk keterlibatan pada politik namun manifestasi dari sebuah politik mobilisasi terdapat pada orientasi partai yang lebih memfokuskan kepada aktor-aktor yang dianggap berpengaruh dalam perebutan kekuasaan untuk meraih jabatan-jabatan tertentu dari pada memberikan pendidikan ideologi kepada keanggotaan partai politik. Akibatnya, koalisi antara partai bisa terjadi bukan karena partai yang berkoalisi memiliki persamaan ideologi dalam membangun sebuah negara akan tetapi mereka lebih mementingkan kekuasaan untuk bisa mendapatkan jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan.

Sebuah proses politik dengan gaya politik mobilisasi menjauhkan elemen masyarakat ke dalam bentuk politik yang sesungguhnya, yakni untuk kemajuan kehidupan bersama namun fakta nyata dilapangan malah sebaliknya mereka hanya memerlukan masyarakat saat adanya pemilu saja (Moch. Nurhasim Jurnal



Penelitian Politik, Vol.1 No. 1, 2004: 61-76). Kekuasaan politik dapat dijadikan sebuah pekerjaan yang hanya bisa didapatkan oleh aktor-aktor yang berduit saja dalam lingkaran politik dalam arti yang sesungguhnya. Mereka bisa bertahan dari proses politik mobilisasi yang tanpa memiliki kemasukan keuangan lain dari jabatan-jabatan yang dimilikinya. Akibat yang bisa dilihat adanya gaya politik mobilisasi seperti gaya politik yang apatis dimana masyarakat tergiring untuk mengikutinya sehingga pada proses pemilihan umum masyarakat akan mudah untuk dimobilisasi dan gerak gerik yang terkait dengan mobilisasi massa tersebut.

Partai politik dan aktor politik berlomba dalam memanfaatkan ilmu ini untuk strategi kampanye dalam memperoleh sebuah masa dengan cara memobilisasi pemilih, Politik dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan tertata secara baik, tapi juga taktis, dengan memiliki suatu tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek, untuk memberikan pemahaman arti politik yang sesungguhnya kepada masyarakat pemilih (Ari Nugraha:2000). Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Sehingga pemilih yang diharapkan adalah dapat mendukung dalam berbagai bentuk dimensinya, khususnya dalam menentukan pilihannya tersebut.

Fenomena mobilisasi dalam pemilu dilihat di Indonesia, Bila kita jeli menangkap makna dari menguatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004, sekurang-kurangnya menandakan beberapa fenomena aktual dalam politik di Aceh. Pertama, ada gejala yang menarik bahwa proses pemilu tampaknya sarat dengan mobilisasi politik kaum serdadu. Di sisi yang lain,

banyak hal yang sama juga dialami oleh pemilih yang lain. Pemilu Legislatif 2004 di Aceh: Antara Intimidasi keterlibatan masyarakat secara murni untuk memilih dengan mobilisasi sangat tipis perbedaannya. Fenomena kedua, meskipun unsur “rekayasa dan mobilisasi” serta bentuk-bentuk kecurangan pemilu tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di Aceh, sejumlah harapan muncul dari hasil Pemilihan Umum 2004 di Aceh. Itu terlihat dari gambaran konstelasi hasil pemilu 2004 di Aceh, dimana fenomena pemilih cenderung hampir mirip komposisinya dengan Pemilu 1997, yang ditandai oleh menangnya partai-partai berideologi Islam, dan minimnya pemilih yang mencoblos partai nasionalis (Moch. Nurhasim Jurnal Penelitian Politik, Vol.1 No. 1, 2004: 61-76).

Di Indonesia misalnya mobilisasi politik yang terjadi ditengah masyarakat telah mengalami berbagai perubahan. Penyebabnya tidak lain adalah terjadinya Pemilihan secara Langsung pada tahun 2004. Di dalam Pemilu legislatif tersebut misalnya, partai-partai besar masih mendominasi dalam peta politik di Indonesia. PDIP misalnya ada nama Megawati menjadi figur pada partai tersebut, lain hal yang terjadi pada Pemilu 2004 kemunculan mobilisasi dilihat dari kepartaian. Partai demokrat misalnya yang dinahkodai oleh sosok SBY yang mampu memobilisasi pemilih dengan sosok seorang SBY tersebut. Mobilisasi dilakukan dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.<sup>3</sup> Mobilisasi yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam bentuk mobilisasi secara tidak langsung karena mempengaruhi cara pikir merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam menentukan

---

<sup>3</sup> (Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Bawaslu DKI Temukan Indikasi Mobilisasi Massa Saat Pencoblosan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/17/18461141/bawaslu.dki.temukan.indikasi.mobilisasi.massa.saah.pencoblosan?page=all>).

pilihannya terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu sedangkan cara pandang merupakan pembentukan persepsi atau penilaian dalam sudut pandang terhadap suatu objek (Direduksi Menurut Stefano, 2007).

Selain itu mobilisasi yang dilakukan partai juga dapat menonjolkan seorang figur atau aktor-aktor. Tentunya figur yang ditampilkan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, sehingga pemilih benar-benar bisa menerimanya dengan melihat kualitas figur yang akan dipilih. Adapun kualitas seorang figur bisa kita lihat dengan kualitas instrumental dimana mereka mampu memberikan komposisi dalam diri seorang figur atau aktor tersebut, faktor simbolis bagaimana interaksi figur terhadap masa pemilih sehingga tertarik untuk menjatuhkan pilihannya (Adman Nursal, 2004:207). Kualitas instrumental adalah kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola organisasi yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*. Kompetensi fungsional adalah kemampuan yang dianggap penting untuk melaksanakan tugas misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, teknologi, dan sebagainya. Kualitas instrumental dapat dilihat dari personal kandidat yaitu kemampuan kandidat tersebut untuk melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dilihat dari *track record* ketika orang tersebut memimpin suatu kelompok atau organisasi. Kualitas instrumental ini sangat dibutuhkan karena jabatan politik memerlukan kemampuan seorang pemimpin yang respon terhadap segala tantangan di depannya.

Berakhirnya masa pemerintah orde lama membuka kerang dalam perpolitikan di Indonesia salah satu lembaga negara yang muncul melalui



perubahan ketiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan perwakilan Daerah (DPD).<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014, adapun fungsi DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Dewan perwakilan Daerah dianggap mampu mengakomodir permasalahan daerah untuk dibawa ke tingkat nasional. Pasal 22 D ayat 3 dijelaskan fungsi DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>4</sup> Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah

negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

DPD merupakan badan dengan perwakilan pada basis wilayah sebenarnya disebut dapat menjadikan peran penting dalam pemerintahan. Alasannya antara lain Pertama, DPD dapat menjalankan penyeimbang terhadap fungsi yang dijalankan oleh DPR sehingga terjadinya (*checks and balances system* dalam badan perwakilan). Kedua, dimana pola rekrutmen berbeda dengan DPR karena mewakili kepentingan daerahnya, anggota DPD tidak akan terjerat dalam kepentingan partai politik seperti hal yang bisa terjadi pada anggota DPR karena DPD lebih berfokus pada kepentingan daerah yang diwakilinya. Ketiga, legitimasi anggota DPD lebih kuat daripada anggota DPR karena dipilih dengan sistem distrik sedangkan anggota DPR dipilih dengan sistem proporsional dan lebih mengutamakan partai politik tempat bernaung dari calon tersebut, sedangkan DPD lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan individu sendiri yang dimilikinya untuk dapat bekerja tanpa embel-embel dari partai politik.

Letak perbedaan antara DPR dan DPD yaitu unsur dari anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing yang diwakilinya. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian '*double-representation*' atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut.



Berdasarkan susunannya badan perwakilan rakyat dapat dibedakan atas perwakilan *bicameral* dan perwakilan *unicameral*.<sup>5</sup> *Bicameral* berarti terdiri dari dua kamar atau dua dewan atau dua balai, sedangkan *unicameral* berarti terdiri dari satu kamar atau satu dewan. (Lubis, 2002:70). Sistem *bicameral* adalah praktik pemerintah yang menggunakan dua kamar legislatif dan parlemen, Untuk itu, masing-masing kamar diusulkan dilengkapi dengan hak veto hak berpendapat. Usulan semacam inilah yang sangat berkaitan erat dengan sifat kebijakan otonomi daerah dimana kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerah dengan memiliki keterwakilan sebagai utusan-utusan wakil yang cenderung sangat luas dan hampir mendekati pengertian sistem federal.

Pemilihan anggota DPD dengan menggunakan perwakilan distrik atau satu wilayah provinsi dengan sistem suara terbanyak, maka pemilihan dewan perwakilan daerah untuk setiap provinsi adalah empat orang. Empat orang berikut ditetapkan sama untuk setiap provinsi, dengan tidak memperlihatkan jumlah penduduk dari setiap provinsi yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian jumlah anggota DPD adalah empat orang dari setiap provinsi dikalikan dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia (Abdullah, 2009:181). Mobilisasi yang dilakukan oleh Elviana kita jumpai di lapangan. Fenomena tentang mobilisasi politik terpilihnya kembali Elviana dalam Pencalonan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019 tidak terlepas dari mobilisasi yang dilakukan oleh elviana adalah bagaimana upaya yang dilakukan terhadap pemilih

---

<sup>5</sup> Di dalam praktek dewasa ini ada negara dimana badan legislatif terbagi dalam dua majelis (*bicameralisme*) dan satu majelis (*unicameralisme*). Boleh dikatakan bahwa semua negara federal memakai sistem dua majelis, oleh karena itu di antaranya mewakili kepentingan negara bagiannya khususnya (India, Amerika Serikat). (Miriam Budiardjo, hal : 180).

supaya mau melakukan bentuk tindakan dan tergiring kedalam tindakan politik tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni memperoleh suara terbanyak sehingga dapat memenangkan pemilu tersebut. Mobilisasi yang dilakukan oleh calon tersebut dapat dijumpai di setiap daerah yang dikunjungi oleh calon tersebut.

Kemenangan pemilu legislatif tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, calon selalu berlomba-lomba dan menarik simpatisan, Peran dari aktor dalam pencalonan legislatif sangat berarti dalam mempengaruhi daya tarik pemilih, figur sangat menentukan seseorang untuk terpilih selain dari program kerja dan ditawarkan, Elviana sangat konsisten dalam meraih dan mendapatkan suara pemilih kalangan kaum hawa. Elviana mampu dan solid dalam memelihara jejaring politiknya, dia juga selalu turun untuk menyapa masyarakat. Selain itu mobilisasi yang dilakukan oleh elviana adalah memberikan dan menjelaskan program-program kerja yang telah dilakukan untuk rakyat ataupun program-program kerja yang akan dilakukan dan akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ini terbukti bahwa Program kerja yang telah dilakukan misalnya memperjuangkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah bank untuk membantu pembangunan di Provinsi Jambi. Selain itu Elviana juga mengusung Program Bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program PSBI. Sudah dibantu lebih dari 300 PAUD dan Lembaga Pendidikan se Provinsi Jambi. Selanjutnya Program Bantuan Alsintan Pertanian dan Modal Usaha Kelompok, Bantuan Benih Pertanian, Program Mekar UMI Program Bantuan untuk masyarakat atau ibu-ibu rumah tangga tanpa agunan dengan syarat

KTP dan KK saja dari Kementerian Keuangan kini sudah mencapai 10.000 nasabah di Provinsi Jambi.

Pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dapil Jambi peneliti melihat persaingan yang cukup ketat menuntut para kandidat berupaya lebih kuat untuk menarik simpati calon pemilih. Para kandidat tentunya harus bisa meyakinkan calon pemilih bahwa mereka layak untuk mengemban amanah rakyat. Tentunya hal ini bisa terwujud dengan cara memobilisasi. Untuk keempat kalinya Elviana sukses kembali untuk duduk sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024. Elviana memperoleh (192.514) suara dikantongi politisi yang terkenal paling rajin turun langsung ke masyarakat. Ria Mayang Sari (239.422 suara), M Syukur (233.514 suara). Sementara M Sum Indra (156.731 suara) tertinggal di bawah Elviana. Motivasi Elviana dalam mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk berjuang demi kesejahteraan dan perubahan bagi seluruh masyarakat Jambi. Hasil perolehan suara sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Keseluruhan Suara DPD RI Tahun 2019**

No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara	Keterangan
1	Abdul Halim	56.712	
2	Abdul Muthalib	42.073	
3	Abu Bakar Jamalia	128.545	
4	Almusyauyat	49.705	
5	Azhar Mulia	57.825	
6	Azim Antoni	76.100	
7	Daryati uteng	121.772	
8	<b>Elviana</b>	<b>198.893</b>	<b>3</b>
9	Eric Hasma	68.917	
10	Ibnu Kholdun	44.783	
11	Kemuning	-	
12	Khairun A Roni	29.034	
13	M Hendri M Noer	12.247	
14	M Sum Indra	156.896	4
15	M Syukur	233.614	2



16	Mustafa Lutfi	39.079	
17	Ria mayang sari	241.365	1
18	Saiful Azwar	18.080	
19	Salmah mahir	54.222	
20	Yasir	17.556	
21	Yuan fanesa	32.903	

*Sumber : Data Sekunder dari KPU Provinsi Jambi*

Dari data tabel yang diatas peneliti tertarik melihat bagaimana Elviana memperoleh suara yang signifikan sehingga mampu mengantarkan kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 walaupun Elviana bukan merupakan putra daerah provinsi Jambi. Berdasarkan jejak karir, Elviana yang merupakan seorang dosen yang tidak memiliki latar belakang politik seperti kebanyakan calon anggota legislatif lainnya. Melihat dari *trade record* seorang Elviana yang tidak memiliki latar belakang sebagai seorang politikus namun memiliki keyakinan untuk mencalonkan diri pada pemilihan DPR RI maka dari itu peneliti tertarik melihat bagaimana keberhasilan Elviana dalam memobilisasi pemilih sehingga mampu menarik pemilih untuk memilih Elviana untuk duduk di kursi di DPD RI 2019-2024 dengan menggunakan konsep mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung dengan dari konsep Menurut Stefano, B. (2007).

Ada beberapa kajian yang membicarakan tentang mobilisasi umumnya hasil penelitian tersebut bahwa ada beberapa mobilisasi yang digunakan dalam kemenangan calon yang diusung dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang melibatkan Elit Politik, Ormas, Etnis untuk memenangkan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah tersebut. Melalui kajian ini peneliti ingin melihat bagaimanakah mobilisasi yang digunakan Elite Politik dalam memobilisasi pemilih ? lalu, mobilisasi apa yang digunakan dalam memobilisasi pemilih? Kajian tentang mobilisasi dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah di

Provinsi Jambi sangat berbeda dengan Penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya notabene-nya membahas mengenai permasalahannya secara umum namun dalam penelitian ini lebih menggali tentang bagaimana peran aktor politik dalam mempengaruhi pemilih.

Penelitian mengenai Mobilisasi politik sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Moch.Wildan Fariz,<sup>6</sup> selanjutnya selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sansan Hasanudin,<sup>7</sup> selanjutnya dengan penelitian I Kadek Eggy Segel dkk.<sup>8</sup>

Dari beberapa beberapa kajian yang membicarakan tentang mobilisasi umumnya hasil penelitian tersebut bahwa ada beberapa mobilisasi yang digunakan dalam kemenangan calon yang diusung dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang melibatkan Elit Politik, Ormas, Etnis untuk memenangkan Pemilihan Dewan

<sup>6</sup> Mobilisasi yang dilakukan adalah dengan memobilisasi masyarakat umum dan juga memobilisasi ke dalam internal Pemuda Pancasila itu sendiri. Kepada masyarakat umum dengan menggunakan tiga cara yaitu 1) pembuatan satgas anti money politik, 2) Kampanye terbuka pada media, 3) Lalu mobilisasi kepada internal dengan menggunakan persuasif instruksi satu komando dari elit yang ada di struktur atas hingga ke tingkatan ranting lalu diteruskan kepada kader yang ada di bawah.

<sup>7</sup> Bahwa sebuah jaringan sosial akan berpotensi menjadi modal politik ketika salah seorang anggota jaringan masuk pada ranah politik praktis. Fenomena ini dicontohkan oleh Uu Ruzhanul Ulum sebagai bagian dari jaringan Hamida yang menjadi kandidat kepala daerah di Tasikmalaya dengan masuk sebagai kader PPP. Modal politik yang berasal dari adanya jaringan ini dapat disebut dengan istilah “kekuatan informal” (informal power). Sedangkan, konsep kekuatan politik yang berasal dari partai politik dapat disebut dengan istilah “kekuatan formal” (formal power).

<sup>8</sup> Mobilisasi yang dilakukan oleh sekaa tajen dilakukan dengan mensosialisasikan Caleg kepada keluarga, kerabat, dan juga masyarakat di desa-desa tempat tajen berlangsung. Masyarakat yang desanya dijadikan sebagai kalangan tajen atau arena tajen sudah pasti akan memilih Caleg yang memiliki ikatan dengan sekaa tajen, karena berkat Caleg tersebut tajen dapat terus dilaksanakan dan memberikan keuntungan dibidang ekonomi dalam hal menambah pendapat masyarakat sekitar. Adanya keterlibatan sekaa tajen dan bebotoh dalam memenangkan Caleg merupakan sebuah bentuk pendewasaan dalam partisipasi politik pada tingkatan lokal. Penelitian ini melihat bagaimana modal sosial mengambil peran penting dalam melakukan mobilisasi terhadap massa dalam sebuah Pemilu di daerah dalam hal ini Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tabanan. Desentralisasi yang saat ini digunakan dalam penyelenggaraan kekuasaan di daerah dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang ingin menguasai sumber daya di ranah lokal untuk menggunakan cara-cara informal seperti membentuk jaringan dengan sekaa tajen yang merupakan sebuah patologi sosial (penyakit sosial di masyarakat).

Perwakilan Daerah tersebut. Melalui kajian ini peneliti ingin melihat bagaimanakah mobilisasi yang digunakan Elviana dalam memobilisasi pemilih ? lalu, mobilisasi apa yang digunakan dalam memobilisasi pemilih? Kajian tentang mobilisasi dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jambi sangat berbeda dengan Penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya notabene-nya membahas mengenai permasalahannya secara umum.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu, peneliti fokus terhadap mobilisasi yang dilakukan Elviana terhadap masyarakat pemilih provinsi Jambi, walaupun pada umumnya penelitian terdahulu juga meneliti tentang mobilisasi politik tetapi peneliti ini lebih memfokuskan mobilisasi politik yang dilakukan oleh Elviana dengan cara datang menemui pemilih secara langsung masyarakat sehingga dapat dilihat bagaimana hubungan yang terjalin lebih dekat. Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian yaitu daerah Pemilihan Provinsi Jambi. Penelitian ini juga akan mendefinisikan bagaimana mobilisasi yang dilakukan Elviana sehingga konsep mobilisasi langsung dan tidak langsung yang ditampakkan dapat benar-benar mampu digunakan dengan baik, selain itu juga peneliti melihat ketokohan dari calon atau kandidat, tingkah laku, gaya berbicara, busana yang digunakan saat menemui masyarakat, sehingga mampu menjadikan modal dalam mendapatkan pemilih terutama masyarakat provinsi Jambi, inilah yang menjadi kebaruan penelitian tentang mobilisasi secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini yang dimaksud dengan observasi lapangan secara mendalam karena menggunakan pendekatan Fenomenologi.



Dimana pendekatan ini melihat menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Selain itu penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat. Hal ini tidak terkecuali dengan negara Indonesia yang mana pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi keterwakilan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga banyak orang berlomba untuk dapat dipilih oleh rakyat sebagai anggota Dewan di Senayan dalam mewakili daerahnya masing-masing.

Menarik bagi peneliti adalah politisi Elviana kelahiran Sawahlunto, 30 November 1966 sebelum terjun ke dunia politik wanita 52 tahun ini aktif di dunia pendidikan menjadi dosen tetap di Universitas Jambi, dosen biologi di FKIP. Sambil mengajar juga STIE & ASM Jambi dan guru. Nyaman menjalani karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi dosen di Universitas Jambi tidak membuat Elviana menutup mata terhadap kondisi masyarakat di provinsi Jambi. Ketika mendapat tawaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Jambi Elviana sempat ragu tetap berada di zona

nyaman atau menduduki kepala dinas atau menempuh belantara politik yang waktu itu masih gelap baginya. Elviana akhirnya mengundurkan diri sebagai PNS demi totalitasnya berjuang di jalur politik. Tahun 2004-2009 ia menjadi wakil rakyat di Fraksi PDI Perjuangan. Tidak merasa puas diri Ibu dari 3 orang anak ini mencoba keberuntungan mencalonkan diri sebagai anggota DPD dapil Jambi untuk periode 2009 – 2014 dan melenggang ke senayan.

Mobilisasi dalam arti kata dapat didefinisikan sebagai hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua faktor, yaitu individu dan Partai. Konsep aktivitas Mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik diartikan sebagai usaha aktor dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan. Pada tahun 2009 perolehan suara Elviana sangat besar dan berada pada urutan satu dengan perolehan suara terbanyak yang mengungguli kandidat lainya dengan jumlah suara (126,736) diikuti pada posisi kedua yaitu M syukur dengan perolehan suara (90.762), pada urutan ketiga yaitu Juniwati T. Masjchun sofwan, dengan perolehan Suara (74.427) dan posisi ke empat didapatkan Hasbi Anshory dengan perolehan suara (58.497), seperti yang terlihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Hasil perolehan suara peserta pemilu tahun 2009 Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi**

No	Nama calon DPD	Perolehan Suara	Ket
1	Abdul Mutalib, S.Ag.	38,653	
2	Abu Bakar Jamalia, H	56,273	
3	Adhi Putra Siaga SY, S.Pd	14,011	
4	Ahmadi Aris, Ir.	17,041	
5	Ahmad Sulhan, S.PT.	19,130	
6	Arrakhmat Eka Putra, SE	14,492	
7	A. Shomad, H.	18,000	

8	Dedek Kusnadi	15,930	
9	Desrinaldy, H., SE.	24,311	
<b>10</b>	<b>Elviana, Hj., Dra., M.Si</b>	<b>126,736</b>	<b>1</b>
11	Fiet Aryadi, S. Kom	18,552	
12	Fikri Riza, S.PT.	10,948	
13	Firmansyah	18,139	
14	Hasbi Anshory, SE., MM	58,497	4
15	Hoesny Hasan, H., SE.	25,014	
16	Iin Inawati, S.Pd	44,492	
17	Iwan Faisal	12,242	
18	Jamek Hasan, H., Drs., M.Si.	29,495	
19	Jaya Kasumantri, S.Pd.	17,449	
20	Juniwati t. Masjchun sofwan, Hj., Dra.	74,427	3
21	Kemas Alfajri Arsyad	14,190	
22	Kemas Faried Alfarelly, SE	36,032	
23	Lukman Zakaria, H., S.Pf.I	36,968	
24	Lusia Rosa Parabak, Ir.	17,448	
25	M. Arfah Hap, H., Drs., MM.	30,055	
26	Megawati, S.SI. APT.	23,252	
27	M. Faisol Amri	7,195	
28	M. Ikhsan	20,575	
29	M. Muslim SY	17,764	
30	M. Syukur, SH	90,762	2
31	Muhammad Nasir, SE	51,265	
32	Muhammad Sobri Assegaf, SE	7,482	
33	Musthafa Luthfi, S.AG.	14,208	
34	M. Toha	6,817	
35	M. Yunus, H., Drs.	14,717	
36	Nizam Hasan, H., Drs.	27,607	
37	Noviardi Ferzi	3,199	
38	Nyimas Ena, Hj., Dra., MM.	22,097	
39	Raden Muhammad Azhar, SH.	5,751	
40	R. Aman Ibrahim, SH.	3,331	
41	Robby Irawan	7,591	
42	Ruslan Gani, H, SH.	5,657	
43	Saiful Roswandi, S.Pd.I	20,939	
44	Salimin Wiryo Tinoyo, Drs.	11,433	
45	Samsul Riduan, ST.	9,826	
46	Sarifah Rosniah,Hj., Dra.,M. HUM.	4,382	
47	Suhendro, SP	5,480	
48	Susianto, Drs.	5,204	
49	Syarifuddin Fadhil, H., Drs.	11,838	
50	Syarif Usman Assegaf	3,050	
51	Syulfah Saridewi Syam, SE., MM.	15,975	
52	Tiopan Purba, BBA.	16,206	
53	Tursiman, SE.	4,979	
54	Waluyo, SE	1,675	
55	Yasmidar Muchtar, HJ., Dra., APT, M.Kes.	11,761	



56 Zainuddin ZA, H., SE	7,012	
<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>1,247,555</b>	<b>80.17%</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>308,525</b>	<b>19.83%</b>
<b>Jumlah Daftar Pemilih Tetap (SK 164)</b>	<b>2,086,780</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah memilih</b>	<b>1,556,080</b>	<b>74.57%</b>
<b>Jumlah tidak memilih</b>	<b>530,700</b>	<b>25.43%</b>

*Sumber : Data Sekunder Komisi Pemilihan Umum RI 2009*

Berdasarkan data di dalam tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bagaimana perolehan suara Elviana berada pada urutan satu dengan perolehan suara terbanyak yakni 126,73 mengalahkan beberapa calon yang lain. Pada posisi kedua yaitu M. Syukur perolehan Suara 90,762 dan pada posisi ketiga Juniwati T. Masjchun Sofwan dengan perolehan 74,427 dan pada posisi ke empat Hasbi Anshory dengan perolehan suara 58,497 Sehingga pada pemilu legislatif tahun 2009 elviana terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

Selama menjabat sebagai senator dia juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi dengan nomor urutan 1 periode 2014-2019. Dengan dukungan masyarakat Jambi, melalui partai Politik besutan Surya Dharma Ali dan kembali mengantar dia menjadi wakil rakyat di senayan. Kekuatan politik tak terbendungkan dalam diri Seorang politisi wanita tersebut sehingga mampu menduduki parlemen dalam 3 periode berturut-turut. Sama halnya dalam pencalonan kembali Elviana untuk Periode 2019-2024 seperti menjadi adegan ulang dalam kesuksesan pada tahun 2009. Untuk kedua kalinya Elviana sukses kembali untuk duduk sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024. Elviana memperoleh (192.514) suara dikantongi politisi yang terkenal paling rajin turun langsung ke masyarakat. Ria Mayang Sari (239.422 suara), M Syukur (233.514 suara). Sementara M Sum Indra (156.731

suara) tertinggal di bawah Elviana. Motivasi Elviana dalam mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk berjuang demi kesejahteraan dan perubahan bagi seluruh masyarakat Jambi sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Keseluruhan Suara DPD RI Tahun 2019**

No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara	Kete
1	Abdul Halim	56.712	
2	Abdul Muthalib	42.073	
3	Abu Bakar Jamalia	128.545	
4	Almusyaayat	49.705	
5	Azhar Mulua	57.825	
6	Azim Antoni	76.100	
7	Daryati uteng	121.772	
<b>8</b>	<b>Elviana</b>	<b>198.893</b>	<b>3</b>
9	Eric Hasma	68.917	
10	Ibnu Kholdun	44.783	
11	Kemuning	-	
12	Khairun A Roni	29.034	
13	M Hendri M Noer	12.247	
14	M Sum Indra	156.896	4
15	M Syukur	233.614	2
16	Mustafa Lutfi	39.079	
17	Ria mayang sari	241.365	1
18	Saiful Azwar	18.080	
19	Salmah mahir	54.222	
20	Yasir	17.556	
21	Yuan fanesa	32.903	

*Sumber : Data Sekunder dari KPU Provinsi Jambi*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa Ria mayang sari berhasil memperoleh suara terbanyak yakni 241.365 disusul oleh M Syukur dengan memperoleh suara 233.614 disusul oleh Elviana berada pada posisi ketiga dengan perolehan suara sebesar 198.893, kemudian disusul oleh M Sum Indra dengan perolehan suara 156.896 yang berada pada posisi keempat dalam pemilihan legislatif tahun 2019, Walaupun pada pemilu legislatif kali ini Elvina tidak setenbar pada pemilihan legislatif 2009 namun dengan perolehan suara

hanya berada pada posisi ketiga tapi tetap bisa melenggang ke senayan. Suara yang diperoleh tidak terlepas dari peran aktif dan sering terjun ke masyarakat sehingga dapat memperoleh suara terbanyak dan sudah dapat kita dilihat bahwa masing-masing calon bersaing ketat dalam pemilu legislatif kali ini.

Sesungguhnya dalam kampanye politik ada yang disebut dengan *election campaign* dan ada pula yang disebut dengan *non election campaign*. Menurut Agranoff (1980: 47) yang dimaksud dengan *election campaign* adalah tidak lain sebagai “upaya yang terorganisir dengan tujuan untuk memenangkan suatu pemilu melalui suatu mobilisasi sumber yang berasal dari manusia, sosial, materi dan lingkungan. Pada dasarnya Kampanye merupakan satu dari 11 tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu yang dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan lingkungan, akuntabel, non diskriminasi dan tanpa kekerasan. Sedangkan tujuan kampanye adalah sebagai:

1. Sarana partisipasi politik warga Negara.
2. Kewajiban peserta Pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
3. Membangun komitmen antara warga negara dengan peserta Pemilu.
4. Menawarkan Visi Misi dan program kepada pemilih.
5. Menyampaikan informasi lain untuk eyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
6. Menyampaikan informasi lain untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. (Sanur: 2014)

Melihat kontestasi politik lima tahun ini pada Pemilu Tahun 2019 turut pula menarik perhatian bagaimana setiap orang berlomba dalam merebut dan mencuri hati rakyat untuk bisa dipilih sehingga dapat mewakili aspirasi rakyat yang memilih. Fenomena ini tentu tidak lepas dari aktor untuk memobilisasi



massa pemilihnya sehingga dapat memenangkan pemilu. Oleh karena itu penelitian ini akan mendalami lebih jauh masalah aktor dalam memobilisasi pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi tahun 2019. Dari dasar tersebut maka rumusan masalah adalah bagaimana mobilisasi dukungan Politik terhadap terpilihnya Elviana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi pada Pemilu tahun 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan merupakan arah dari suatu penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Bila permasalahan mempertanyakan hal-hal yang belum diketahui, maka tujuan merinci apa saja yang ingin diketahui. Jika permasalahan sudah terjawab maka tujuan penelitian sudah tercapai. Dalam penelitian yang berjudul “Mobilisasi dukungan politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Jambi Tahun 2019 terdapat maksud dan tujuan yang hendak diketahui. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis mobilisasi dukungan terhadap Elviana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan menggunakan kerangka konsep mobilisasi politik sebagai acuan dalam melihat fenomena penelitian yang ingin peneliti bahas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Kegunaan manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis merupakan kegunaan yang berguna bagi perkembangan suatu disiplin ilmu. Sedangkan manfaat praktis merupakan kegunaan yang bisa diambil dari sebuah penelitian dan diterapkan pada lokasi atau objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap ilmu pengetahuan terkait tentang mobilisasi yang dilakukan dalam mendapatkan simpatisan dalam ajang pemilihan Umum sehingga dapat dipilih nantinya. Peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan menambah pengetahuan studi bagi pengembangan konsep atau teori keilmuan sosial dan politik pada umumnya, dan mobilisasi politik dalam mengarahkan pilihan masyarakat pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan ilmu baru terutama kajian tentang mobilisasi dalam pemilihan umum, dimana dalam mobilisasi dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung, dimana bentuk mobilisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni mendapatkan dukungan dan simpatisan masyarakat sehingga dapat memenangkan kontes pemilu nantinya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon yang lainnya sehingga dalam memberikan konsep kepada

masyarakat mampu berperan untuk melakukan bentuk memobilisasi pemilih sehingga dapat terpilih dalam pemilu legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah nantinya dan tidak hanya itu nantinya juga akan mampu mengiring pemilih untuk dapat memilih jika nanti mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan lainnya.

